



DPMPTSP
TEMANGGUNG

RENCANA KERJA

TAHUN 2025



**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung**

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

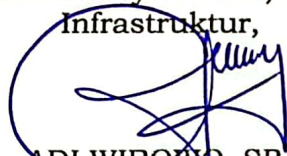
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 10 Juli 2024

Koordinator Bidang Ekonomi,
Sumberdaya Alama, dan
Infrastruktur,



ADI WIBOWO, SP.
NIP. 198111012009031003

Petugas Verifikator



ARIYANTO PURWOKO SIWI, S.E.
NIP. 199401222019031004

Mengetahui,

KERALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Pemerintah Dinas Penanaman Modal dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2025 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Perencanaan Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2024.

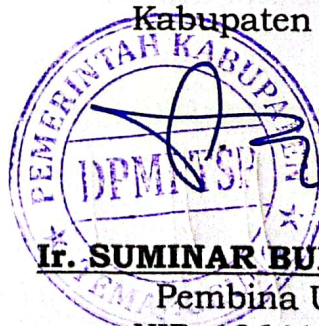
Rencana Kerja (Renja) ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas – tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan (guideline) bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas – tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap OPD termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas – tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kabupaten Temanggung dan Dinas Penanaman Modal.

Temanggung, 1 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung,



Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196411141990031005

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN VERIFIKASI | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 7 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 9 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2023..... | 11 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra DPMPTSP tahun 2019-2024..... | 11 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... | 19 |
| 2.3 Data Pokok..... | 25 |
| 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... | 33 |
| 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD | 34 |
| 2.6 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat..... | 40 |
| 2.7 Inovasi Perangkat Daerah..... | 40 |
| 2.8 Penghargaan..... | 41 |
| BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 42 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... | 42 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN | 45 |
| 4.1 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... | 45 |
| BAB V PENUTUP | 67 |

DAFTAR TABEL

| | |
|------------|---|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s.d Tahun 2023 |
| Tabel 2.2 | Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal Triwulan I Tahun 2024 Kabupaten Temanggung |
| Tabel 2.3 | Indeks Kemudahan Berusaha |
| Tabel 2.4 | Realisasi Investasi Tahun 2019-2024 |
| Tabel 2.5 | Persentasi Kajian Teknis Investasi Tahun 2019-2024 |
| Tabel 2.6 | Peresentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih Tahun 2019-2024 |
| Tabel 2.7 | Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan tahun 2019-2024 |
| Tabel 2.8 | Data peluang usaha |
| Tabel 2.9 | Persentase Pelayanan perizinan On line tahun 2019-2024 |
| Tabel 2.10 | Persentase Permohonan Izin Bebas Calo Tahun 2019-2024 |
| Tabel 2.11 | Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Tahun 2019-2024 |
| Tabel 2.12 | Persentase Kesesuaian Perizinan Tahun 2019-2024 |
| Tabel 2.13 | Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan Tahun 2019-2024 |
| Tabel 2.14 | Persentase Tertanganinya Gugatan Hukum di Dalam Pengadilan Tahun 2019-2024 |
| Tabel 2.15 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 |
| Tabel 2.16 | Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat |
| Tabel 2.17 | Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023 |
| Tabel 2.18 | Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023 |
| Tabel 3.1 | Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2025 |
| Tabel 4.1 | Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung Tahun 2025 |
| Tabel 4.2 | Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung Tahun 2025 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

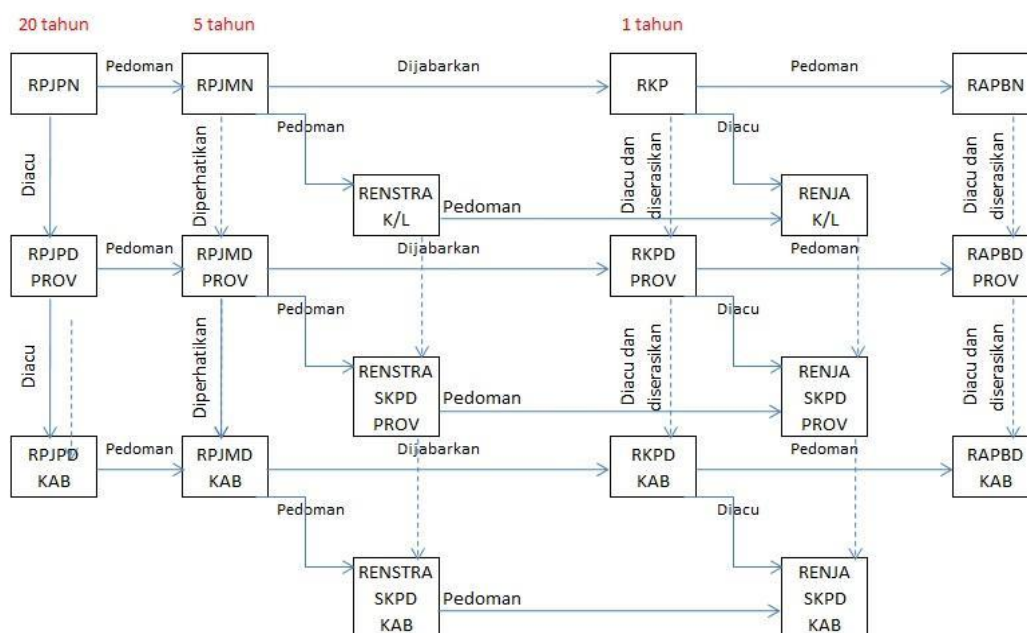
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul

terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-

- 2029; Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Noor 6 Tahun 2010 tentang Rencana ata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
s.d Tahun 2023

| No | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATUAN | TARGET AKHIR RENSTRA (2023) | | TARGET 2023 | | | REALISASI 2023 | | CAPAIAN SD 2023 | |
|----------|--|---|----------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | K | Rp. | K | Rp (RENJA) | Rp (DPA) | K | Rp. | K | Rp. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | PENANAMAN MODAL | | | | | | 1.354.629.400 | 806.107.200 | | 798.065.150 | | |
| 1 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | | | | | 150.000.000 | 25.000.000 | | 24.422.300 | | 24.422.300 |
| | | Nilai Realisasi Investasi | Milyar | 625 | | 625 | | | 2.046 | | 625 | |
| | | Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi | % | 10 | | 100 | | | 100 | - | 100 | |
| | | Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih | % | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |
| | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab.Kota | | | | | | 75.000.000 | 20.000.000 | | 19.610.800 | | |
| | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Tersedianya Kegiatan Forum investasi berbasis kewilayahan | Kegiatan | 2 | 110.000.000 | | 75.000.000 | 20.000.000 | 1 | 19.610.800 | 100 | |
| | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | 75.000.000 | 5.000.000 | | 4.811.500 | | |
| | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota' | Dokumen | 2 | 40.000.000 | | 75.000.000 | 5.000.000 | 1 | 4.811.500 | 100 | |
| 2 | Program Promosi Penanaman Modal | | | | | | 410.000.000 | 8.000.000 | | 7.849.000 | | |
| | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab.Kota | | | | | | 410.000.000 | 8.000.000 | | 7.849.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|-----|-------------|-----|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------|--|
| | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Tersedianya SDM Perizinan yang Terlatih guna peningkatan pelayanan perizinan | Pelaku Usaha | 80 | 30.000.000 | | 90.000.000 | 3.000.000 | 2 | 2.960.500 | 100 | |
| | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan peraturan perizinan | Pelaku Usaha | 150 | 120.000.000 | | 320.000.000 | 5.000.000 | 1 | 4.888.500 | 100 | |
| 3 | Program Pelayanan Penanaman Modal | | | | | | 409.629.400 | 407.907.200 | | 404.497.489 | | |
| | | Persentase pelayanan perizinan online | % | 100 | | 100 | | | 100 | - | 100 | |
| | | Persentase perizinan yang bebas calo | % | 100 | | 100 | | | 100 | - | 100 | |
| | | Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu | % | 95 | | 100 | | | 100 | - | 100 | |
| | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 409.629.400 | 407.907.200 | | 404.497.489 | | |
| | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik | Terlaksananya Percepatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu' | | 12 | 310.000.000 | | 389.629.400 | 402.907.200 | 13781 | 399.497.489 | 100 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Perizinan | Persen | 12 | | 100 | | | 100 | | 100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--------|-----|-------------|-----|----------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| | | Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dengan baik | Persen | 1 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Terselesaikannya Pengaduan dan Gugatan di Pengadilan | Persen | 12 | | | 20.000.000 | 5.000.000 | 252 | 5.000.000 | 100 |
| 4 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | | | 385.000.000 | 365.200.000 | | 361.296.361 | |
| | | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Perizinan yang diterbitkan | Persen | 100 | | 100 | | | 100 | - | 100 |
| | | Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan | Persen | 100 | | 100 | | | 100 | - | 100 |
| | | Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan | Persen | 100 | | 100 | | | 100 | - | 100 |
| | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah/kabupaten | | | | | | 385.000.000 | 365.200.000 | | 361.296.361 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya pemantauan Penanaman Modal | | 12 | 100.000.000 | | 87.500.000 | - | 0 | - | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terselenggaranya Temu Usaha dalam rangka menjaring penanam modal luar daerah di kabupaten temanggung dan dalam daerah berbasis potensi unggulan daerah | | 3 | 250.000.000 | | 195.000.000 | 330.200.000 | 244 | 328.907.153 | 100 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian PM dan Perizinan | | 12 | 150.000.000 | | 102.500.000 | 35.000.000 | 10 | 32.389.208 | 100 |
| B | PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH | | | | | | 3.639.689.153 | 3.648.303.747 | 6 | 3.482.681.534 | 95 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------------|-----|---------------|--|----------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|--|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 3.639.689.153 | 3.648.303.747 | 6 | 3.482.681.534 | 95 | |
| | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | - | - | | - | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi | Dokumen | 33 | 7.000.000 | | - | - | 26 | - | 79 | |
| | Administrasi Keuangan | | | | | | 2.829.053.553 | 2.255.168.247 | | 2.180.154.011 | | |
| a | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 14 | 3.429.585.800 | | 2.829.053.553 | 2.255.168.247 | 14 | 2.180.154.011 | 100 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 280.000.000 | 450.000.000 | | 447.562.347 | | |
| | Sosialisasi Peraturan PerUndang Undangan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Orang | | | | 280.000.000 | 450.000.000 | 10 | 447.562.347 | 100 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 154.750.000 | 136.750.000 | | 121.589.795 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Paket | 12 | 5.000.000 | | 5.900.000 | 5.900.000 | 12 | 4.978.000 | 100 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 40.000.000 | | 25.000.000 | 25.000.000 | 12 | 24.274.500 | 100 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan | Paket | 12 | 66.172.000 | | 50.000.000 | 45.000.000 | 12 | 32.910.953 | 100 | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 140 | 15.000.000 | | 43.850.000 | 30.850.000 | 12 | 29.655.000 | 100 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 40.000.000 | | 30.000.000 | 30.000.000 | 12 | 29.771.342 | 100 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 525.885.600 | 520.885.600 | | 456.015.707 | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | | 3.000.000 | 3.000.000 | 12 | 2.870.000 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|----|-------------|--|--------------------|--------------------|----|--------------------|-----|--|
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet | Laporan | 12 | 98.000.000 | | 90.000.000 | 90.000.000 | 12 | 63.789.529 | 100 | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Laporan | 12 | | | 19.654.800 | 19.654.800 | 12 | 19.495.000 | 100 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 418.230.000 | | 413.230.800 | 408.230.800 | 12 | 369.861.178 | 100 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 130.000.000 | 285.499.900 | | 277.359.674 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 14 | 90.000.000 | | 45.000.000 | 63.000.000 | 14 | 60.372.674 | 100 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | Unit | 1 | 130.000.000 | | 75.000.000 | 212.500.000 | 1 | 207.123.000 | 100 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | Unit | 1 | 40.000.000 | | 10.000.000 | 9.999.900 | 1 | 9.864.000 | 100 | |

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - Meningkatnya laju investasi dan kualitas pelayanan publik
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Nilai realisasi investasi;
 - b. Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi;
 - c. Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih;
 - d. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan;
 - e. Persentase pelayan perizinan online;
 - f. Persentase perizinan bebas calo;
 - g. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu;
 - h. Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan;
 - i. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan;
 - j. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ;
 - b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota;

- c. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal;
 - d. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - f. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
 - g. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Modal;
 - h. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Modal;
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi;
 - j. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - k. Sosialisasi Peraturan PerUndang Undangan;
 - l. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - m. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - n. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - o. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - p. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
 - q. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - r. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - s. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor;
 - t. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - u. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
 - v. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - w. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
4. Tidak ada Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 5. Tidak ada Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
 6. Tidak ada Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

7. Tidak ada Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Memuaskan** yaitu dengan nilai **100%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan I tahun 2024 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan I Tahun 2024
(Laporan IKPD)
 Kabupaten Temanggung

| No | Indikator Kinerja Utama Daerah | Satuan | Kondisi akhir 2023 | Target Kinerja Program | | | Realisasi Kinerja | | | Capaian s.d tw 1 2024 | Status Capaian | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|------------------------|------|------|-------------------|------|------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|---------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pertumbuhan realisasi investasi | % | n.a | 2,5 | 3 | 3,5 | -74,87 | | | 0 | | | | | | | | V | | | | | | |
| | | Pembilang : Realisasi Investasi Daerah | | | | | 527.004.009.269 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyebut : Target Realisasi Investasi Daerah | | | | | 2.097.406.904.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | V | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembilang : Jumlah Informasi peluang usaha | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyebut : jumlah peluang usaha sektor unggulan | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase perusahaan yang bermitra | % | n.a | 50 | 60 | 70 | 0 | | | 0 | | | | | | | | V | | | | | | |
| | | Pembilang : jumlah perusahaan yang bermitra | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyebut : jumlah perusahaan besar | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Persentase promosi penanaman modal | % | n.a | 100 | 100 | 100 | 0 | | | 0 | | | | | | | | V | | | | | | |
| | | Pembilang : Jumlah Kegiatan Promosi | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyebut : jumlah event promosi yang harus diikuti | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik | % | n.a | 100 | 100 | 100 | 91 | | | 90,92 | | V | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembilang : Jumlah Pelayanan Perizinan secara Elektronik | | | | | 2532 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyebut : semua Perizinan yang masuk | | | | | 2785 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | V | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembilang : Perizinan yang terbit tepat waktu | | | | | 2785 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----|-----|-----|-------|--|--|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Penyebut : Jumlah pengajuan perizinan | | | | | 2785 | | | | | | | | |
| | Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | V | | | | |
| | | Pembilang : Jumlah pengaduan yang tertangani | | | | | 56 | | | | | | | | |
| | | Penyebut : Pengaduan Masyarakat | | | | | 56 | | | | | | | | |
| 4 | Persentase pengendalian penanaman modal | % | n.a | 12 | 16 | 20 | 66,67 | | | 100 | V | | | | |
| | | Pembilang : Jumlah perusahaan yang didampingi dalam melaksanakan LKPM dalam satu tahun | | | | | 8 | | | | | | | | |
| | | Penyebut : Jumlah Perusahaan Wajib LKPM | | | | | 12 | | | | | | | | |
| 5 | Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal | % | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | V | | | | |
| | | Pembilang : jumlah dokumen data yang disajikan | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | Penyebut : jumlah dokumen data yang wajib disajikan | | | | | 1 | | | | | | | | |
| JUMLAH IKUPD | | 1 | RATA-RATA CAPAIAN IKUPD | | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUMLAH INDIKATOR PROGRAM | | 8 | RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM | | | | | | | 73,86 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| JUMLAH TOTAL INDIKATOR PERANGKAT DAERAH | | 9 | RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH | | | | | | | 36,93 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 6 terdiri dari:
 - a. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah UMR di Kabupaten Temanggung masih rendah, Kondisi sosial masyarakat kondusif, Kabupaten Temanggung berada di lokasi yang strategis karena dekat dengan bandara dan pelabuhan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kendala pada kebijakan lahan industri, diantaranya terkait dengan : Kebijakan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) dari Kementerian ATR/BPN tidak sinkron dengan Perda RTRW yang ada, Perda RTRW terbaru belum disahkan, Regulasi sektoral masih dalam proses penyesuaian dengan UU CK.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi dengan OPD pengampu untuk mendorong percepatan penyelesaian terkait dengan pengesahan Perda RTRW, Menjalin koordinasi dengan DPUPR dan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan penyesuaian LSD dengan Perda RTRW di Kabupaten Temanggung, Menjalin koordinasi untuk percepatan penyesuaian regulasi.
 - b. Persentase Pelayanan Perizinan secara elektronik
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, jaringan internet yang lancar dan sumberdaya manusia yang terlatih.
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah Masih ada pemohon yang belum paham penggunaan layanan perizinan berbasis elektronik , dan pemohon yang telah mengajukan permohonan perizinan secara elektronik tidak langsung melanjutkan proses perizinannya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan pendampingan terhadap pemohon dan melaksanakan sosialisasi perizinan berbasis elektronik, menghubungi pemohon untuk segera melakukan proses

selanjutnya.

- c. Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah perizinan sudah dilakukan secara online
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah Masih kurangnya informasi dan pengetahuan pemohon izin dalam mengajukan izin secara online, gangguan teknis pada aplikasi perizinan serta masih ada izin yang belum dapat dilaksanakan secara online
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memperluas informasi tata cara berizin melalui OSS
- d. Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Melaksanakan pelayanan sesuai SOP yang ada dan peningkatan SDM
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah Pemohon kurang paham terhadap prosedur yang ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melaksanakan pelayanan sesuai SOP, Pelayanan Prima
- e. Persentase Pengendalian Penanaman Modal
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Terjalannya komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha dengan DPMPTSP Kab. Temanggung dalam menyelesaikan hambatan yang dialami pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah Sistem Perizinan berusaha elektronik (Sistem OSS-RBA) merupakan amanat dari pemerintah pusat sehingga, pada kendala sistem perizinan elektronik, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan secara penuh, sehingga tidak semua kendala bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menjalin koordinasi secara aktif dengan pelaku usaha dan pemerintah pusat
- f. Persentase Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tersedianya data di Sistem OSS-RBA
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah Sistem OSS-

RBA yang belum stabil sehingga terkendala pada saat melakukan akses data

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menjalin koordinasi secara aktif dengan pemerintah pusat terkait sistem
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai tidak ada.
 3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 3 terdiri dari:
 - a. Pertumbuhan realisasi investasi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah UMR di Kabupaten Temanggung masih rendah, Kondisi sosial masyarakat kondusif, Kabupaten Temanggung berada di lokasi yang strategis karena dekat dengan bandara dan pelabuhan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kendala pada kebijakan lahan industri, diantaranya terkait dengan: Kebijakan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) dari Kementerian ATR/BPN tidak sinkron dengan Perda RTRW yang ada, Perda RTRW terbaru belum disahkan, Regulasi sektoral masih dalam proses penyesuaian dengan UU CK
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi dengan OPD pengampu untuk mendorong percepatan penyelesaian terkait dengan pengesahan Perda RTRW, Menjalin koordinasi dengan DPUPR dan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan penyesuaian LSD dengan Perda RTRW di Kabupaten Temanggung, Menjalin koordinasi untuk percepatan penyesuaian regulasi.
 - b. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Pasar menjadi lebih luas, produktivitas usaha meningkat, lapangan kerja menjadi lebih luas
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Produk belum memenuhi standar perusahaan, legalitas usaha belum lengkap, komitmen keberlanjutan penyediaan produk dari pelaku usaha yang kurang stabil

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan pendampingan perizinan usaha dan melakukan kolaborasi dengan OPD terkait untuk melakukan pembinaan dalam meningkatkan kualitas produk
- c. Persentase promosi penanaman modal.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah UMR di Kabupaten Temanggung masih rendah, Kondisi sosial masyarakat kondusif, Kabupaten Temanggung berada di lokasi yang strategis karena dekat dengan bandara dan pelabuhan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, belum adanya I-Pro yang siap ditawarkan kepada investor.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan promosi bersama pada CJIBF yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Prov. Jawa Tengah.

2.3. Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Penanaman Modal dan Data Pokok Bidang Perizinan dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Penanaman Modal
 - a. Pertumbuhan Realisasi Investasi

Realisasi Indeks kemudahan berusaha baru mulai diukur pada triwulan 4 Tahun 2021 dengan hasil yang diperoleh adalah 78 angka tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 target Indeks Kemudahan Berusaha adalah pada angka 60, hal ini dikarenakan banyaknya regulasi yang mendukung kemudahan berusaha baik dari Pusat maupun Daerah. Pada tahun 2022 indeks kemudahan berusaha mencapai angka 82 sedangkan kan target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah pada angka 62,5 dengan kata lain indeks kemudahan berusaha pada tahun 2022 sudah melebihi target dan meningkat jika dibandingkan

tahun 2021, hal ini didorong dengan adanya regulasi regulasi baru yang mendorong Kemudahan Berusaha, Sedangkan pada tahun 2023 indeks kemudahan berusaha masih dalam proses pengukuran. Data Indikator kemudahanberusaha tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Indek Kemudahan Berusaha
Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2024

| NO | TAHUN | Indeks Kemudahan Berusaha |
|----|-------|---------------------------|
| 1 | 2019 | n.a |
| 2 | 2020 | n.a |
| 3 | 2021 | 78 |
| 4 | 2022 | 82 |
| 5 | 2023 | 82* |
| 6 | 2024 | 82* |

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan I

b. Nilai Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah nilai modal yang dipergunakan investor dalam menanamkan usahanya di berbagai bidang usaha terbuka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Ruang Lingkup realisasi investasi meliputi realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Rumus nilai investasi pada tahun berjalan adalah penjumlahan dari realisasi investasi bidang usaha baru di tahun yang bersangkutan

Tabel 2.4
Realisasi Investasi Tahun 2019-2024

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|--------------------------------|-------|----------|----------|---------|---------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Nilai investasi tahun berjalan | 375,6 | 1.245,66 | 1.496,68 | 1.836,0 | 2.046,2 | 527,0 |
| 2 | Nilai investasi PMDN | | 1.245,66 | 1.486,42 | 1.529,1 | 1.326,5 | 489,5 |
| 3 | Nilai investasi PMA | | 0 | 10,26 | 306,9 | 719,7 | 43,5 |

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan I

c. Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi

Kajian Teknis adalah kajian untuk menganalisa kelayakan suatu rencana investasi yang meliputi perkiraan biaya investasi, kapasitas produksi dan teknologi.

Potensi Investasi adalah kemampuan investasi yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi aspek teknis, analisa kelayakan atau menghitung kelayakan.

Rumus untuk mendapatkan Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi adalah Jumlah potensi Investasi yang sudah dikaji dibagi Jumlah seluruh Potensi Investasi dikali 100.

Tabel 2.5
Persentase Kajian Teknis Investasi
Tahun 2019-2024

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah potensi Investasi yang sudah diKaji | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Jumlah potensi Investasi | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | Persentase | 15,63 | 28,13 | 28,13 | 28,13 | 28,13 | 28,13 |

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan I

d. Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih

Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih adalah ketersediaan SDM yang siap, mau dan mampu melaksanakan tugas dalam usaha pencapaian target investasi dan pelayanan perizinan.

Ruang lingkup dari kegiatan ini meliputi SDM DPMPTSP. Rumus dari indikator ini adalah Jumlah SDM ASN yang mengikuti pelatihan dibagi Jumlah SDM ASN dikali 100.

Tabel 2.6
Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal
dan Perizinan yang terlatih Tahun 2019-2024

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|--------------------------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah SDM yang terlatih | 77 | 0 | 19 | 20 | 18 | 18 |
| 2 | Jumlah SDM | 77 | 40 | 43 | 20 | 18 | 18 |
| | Persentase | 100 | 0 | 44,18 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : DPMPSTSP 2024 triwulan I

e. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan

Definisi : tersedianya informasi untuk masyarakat dunia usaha terkait dengan peluang investasi yang ada di Kabupaten Temanggung.

Ruang Lingkup : Sektor Pariwisata, sektor UMKM, sektor Pertanian, Perkebunan, sektor peternakan dan sektor perikanan.

Rumus Jumlah informasi yang akan disediakan dibagi jumlah peluang usaha sektor/bidang unggulan dikali 100%.

Tabel 2.7
Persentase tersedianya informasi peluang usaha
sektor/bidang unggulan Tahun 2019-2024

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah informasi yang disediakan | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Jumlah peluang usaha sektor unggulan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Persentase | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : DPMPSTSP 2024 triwulan I

Untuk indikator persentase tersedianya informasi peluang usaha/ sektor bidang unggulan di tahun 2020 masih 60 % tersedia yaitu bidang Pariwisata, UMKM dan Pertanian, sedangkan pada tahun 2021 belum ada penambahan informasi peluang usaha di karenakan keterbatasan anggaran. Pada tahun 2024 triwulan I jumlah peluang usaha yang sudah diinformasikan sudah 100 % dari jumlah Peluang usaha yang ada.

Tabel 2.8
Data Peluang Usaha

| No | Peluang Usaha | Sudah / Belum Diinformasikan | Keterangan |
|----|---------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | Sektor Pariwisata | Sudah | |
| 2 | Sektor UMKM | Sudah | |
| 3 | Sektor Pertanian/ Perkebunan | Sudah | |
| 4 | Sektor Peternakan | Sudah | |
| 5 | Sektot Perikanan | Sudah | |

Sumber : DPMPTSP 2023 triwulan IV

2. Data Pokok Bidang Perizinan

a. Persentase Pelayanan perizinan

Pelayanan Perizinan On line adalah pelayanan yang didasarkan/berbasis pada teknologi, informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.

Ruang lingkup indikator ini meliputi data perizinan dan non perizinan dan Perizinan yang sifatnya komersial.

Rumus indikator ini jumlah permohonan on line yang terlayani dibagi dengan jumlah permohonan on line yang masuk kali 100.

Tabel 2.9
Persentase Pelayanan Perizinan On Line
Tahun 2019-2024

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah permohonan on line yang terlayani | 1.272 | 6.023 | 10.124 | 11.566 | 13.781 | 2.512 |
| 2 | jumlah permohonan on line yang masuk | 2.753 | 6.575 | 10.124 | 11.791 | 13.781 | 2.512 |
| | Persentase | 46,2 | 91,60 | 100 | 98,09 | 100 | 100 |

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan I

b. Persentasr perizinan bebas calo

Perizinan bebas calo adalah pengurusan perizinan yang dilakukan secara mandiri, transparan antara pemohon dan petugas.

Ruang lingkup indikator untuk tercapainya perizinan yang bebas calo adalah SDM perizinan dan juga masyarakat.

Rumus indikator persentase perizinan bebas calo adalah Jumlah permohonan perizinan yang bebas calo dibagi permohonan perizinan kali 100.

Tabel 2.10
Persentase Permohonan Izin Bebas Calo
Tahun 2019-2024

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------|------|--------|--------|--------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah permohonan Izin bebas calo | 2753 | 6575 | 10.294 | 11,791 | 13.781 | 2.762 |
| 2 | Jumlah permohonan izin | 2753 | 6575 | 10.294 | 11,791 | 13.781 | 2.762 |
| 3 | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan I

c. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu

Definisi dari penyelesaian perijinan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan prosedur dan syarat-syaratnya.

Ruang lingkup indikator ini adalah semua pemohon ijin sifatnya komersial dan non komersial.

Rumusnya adalah jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu dibagi jumlah permohonan izin yang diterbitkan dikali 100.

Tabel 2.11
Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu
Tahun 2019-2024

| NO | URAIAN | Tahun | | | | | |
|----|---|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Izin tepat waktu | 1232 | 6091 | 10.294 | 11,791 | 13.781 | 2.762 |
| 2 | Jumlah permohonan izin yang diterbitkan | 1517 | 6575 | 10.294 | 11,791 | 13.781 | 2.762 |
| 3 | Persentase | 49,28 | 92,64 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan I

d. Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.

Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup indikator ini adalah izin yang diterbitkan.

Rumus Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan adalah Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan dibagi dengan jumlah izin yang diterbitkan kali 100.

Tabel 2.12
Persentase Kesesuaian Perizinan
Tahun 2019-2024

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|--|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan | 110 | 155 | 159 | 164 | 130 | 8 |
| 2 | Jumlah izin yang diterbitkan | 110 | 166 | 170 | 164 | 130 | 8 |
| | Persentase | 100 | 93,3 | 93,5 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan I

e. Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan untuk penanganan pengaduan pelayanan publik dan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberi tugas kepada petugas penanganan yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan.

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya ketidaksesuaian standar proses perizinan atau ketidaksesuaian komitmen Pelaku usaha terhadap izin yang sudah dikeluarkan oleh

DPMPTSP. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara lain melalui surat aduan, kotak aduan, melalui website DPMPTSP, dan sms gateway. DPMPTSP telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 034 Tahun 2018.

Ruang lingkup data ini adalah pengelolaan aduan.

Rumus indikator ini adalah Jumlah Pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi dengan jumlah aduan kali 100.

Tabel 2.13
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan
Tahun 2019-2024

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|--------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Pengaduan terselesaikan | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 18 |
| 2 | Jumlah Pengaduan | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 18 |
| | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan I

- f. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan

Definisi Gugatan hukum adalah permasalahan baik pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Biasanya, bagi orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas keputusan tersebut, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun berdasarkan atas pelaksanaan salah satu kegiatan penanaman modal di Kabupaten Temanggung.

Ruang Lingkup gugatan terhadap perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Peyanan Terpadu Satu Pintu dan Peyanan Terpadu Satu Pintu.

Rumus Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan di bagi jumlah gugatan dikali 100%.

Tabel 2.14
Persentase Tertanganinya Gugatan Hukum Di Dalam Pengadilan Tahun 2019-2024

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|--|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah gugatan hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan I

2.4 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari 9 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator Pertumbuhan realisasi investasi
Hal ini disebabkan karena baru diukur dalam triwulan I dan investasi akan tercapai bahkan melebihi target saat memasuki triwulan III.
 - Indikator Persentase perusahaan yang bermitra

Hal ini disebabkan karena UMKM tidak konsisten dalam memasarkan produknya di perusahaan yang bermitra

- Indikator Persentase promosi penanaman modal

Hal ini disebabkan bahwa promosi penanaman modal dilaksanakan pada Triwulan ke III

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain :

- Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan masih kurang (laptop, printer, meja kursi rapat);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DPMPTSP belum dapat dilaksanakan secara satu pintu, pemohon masih datang ke dinas teknis terkait dengan izin yang diajukan;

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar :

- Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
- Membentuk Mal Pelayanan Publik.

2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD tidak terdapat penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.15

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

| RANCANGAN AWAL RKPD 2025 | | | | | | | RANCANGAN AWAL RKPD 2025 (HASIL ANALISIS KEBUTUHAN) | | | | | | | KET |
|--|--|----------------------|---|----------------|-------------|----------------------|--|--|----------------------|---|----------------|-------------|----------------------|-----|
| No | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif | NO | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | |
| A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah | | | 2.345.666.263 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah | | | 2.345.666.263 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Temanggung | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 18 | Orang/bulan | 2.345.666.263 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Temanggung | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 18 | Orang/bulan | 2.345.666.263 | |
| 2 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 600.000.000 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 600.000.000 | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kabupaten Temanggung | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 400 | orang | 600.000.000 | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kabupaten Temanggung | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 400 | orang | 600.000.000 | |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 123.500.000 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 123.500.000 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Temanggung | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 5.000.000 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Temanggung | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 5.000.000 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kabupaten Temanggung | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 28.500.000 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kabupaten Temanggung | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 28.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|-----|---------|-------------------|--|--|----------------------|--|-----|---------|--------------------|--|
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kabupaten Temanggung | Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaanyang Disediakan | 60 | Paket | 30.000.000 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kabupaten Temanggung | Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaanyang Disediakan | 60 | Paket | 30.000.000 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kabupaten Temanggung | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 150 | Laporan | 30.000.000 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kabupaten Temanggung | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 150 | Laporan | 30.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Temanggung | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 | Laporan | 30.000.000 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Temanggung | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 | Laporan | 30.000.000 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 733.179.000 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kabupaten Temanggung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | Laporan | 3.000.000 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kabupaten Temanggung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | Laporan | 3.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Temanggung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Laporan | 100.000.000 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Temanggung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Laporan | 190.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Temanggung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | 17.000.000 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Temanggung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | 17.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kabupaten Temanggung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | 523.179.000 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kabupaten Temanggung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | 523.179.000 | |
| 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 80.000.000 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 80.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Temanggung | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 14 | Unit | 60.000.000 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Temanggung | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 14 | Unit | 60.000.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Temanggung | Terpeliharanya Gedung Kantor | 1 | Unit | 5.000.000 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Temanggung | Terpeliharanya Gedung Kantor | 1 | Unit | 5.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|-----|---------|--------------------|--|--|---|-----------------------------|--|-----|---------|------------------|
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kabupaten Temanggung | Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | 182 | Unit | 15.000.000 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kabupaten Temanggung | Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | 182 | Unit | 15.000.000 |
| B | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | |
| 1 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota | | Tersediannya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota | | | 20.000.000 | | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota | | Tersediannya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota | | | |
| | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Kabupaten Temanggung | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | 1 | Dokumen | 20.000.000 | | | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Kabupaten Temanggung | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | | | |
| | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Kabupaten Temanggung | Jumlah Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | 75.000.000 | | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Kabupaten Temanggung | Jumlah Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | 7.000.000 |
| | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Kabupaten Temanggung | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | 1 | Dokumen | 75.000.000 | | | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Kabupaten Temanggung | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | 1 | Dokumen | 7.000.000 |
| C | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota | | | | | 200.000.000 | | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota | | | | | 7.000.000 |
| | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Temanggung | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 1 | Dokumen | 150.000.000 | | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Temanggung | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 1 | Dokumen | 7.000.000 |
| | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota | Kabupaten Temanggung | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/kota | 1 | Dokumen | 50.000.000 | | | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota | Kabupaten Temanggung | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/kota | | | - |
| D | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|------|--------------|---------------|--|--|--|----------------------|--|------|--------------|-------------|--|
| 1 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Kabupaten Temanggung | Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | 2.108.281.010 | | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Kabupaten Temanggung | Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | 252.403.510 | |
| | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kabupaten Temanggung | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 4000 | Pelaku Usaha | 2.088.281.010 | | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kabupaten Temanggung | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 4000 | Pelaku Usaha | 245.403.510 | |
| | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Kabupaten Temanggung | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 100 | Pelaku Usaha | 20.000.000 | | | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Kabupaten Temanggung | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 100 | Pelaku Usaha | 7.000.000 | |
| E | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | | |
| | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 404.961.000 | | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 404.961.000 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kabupaten Temanggung | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kabupaten Temanggung | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kabupaten Temanggung | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kabupaten Temanggung | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kabupaten Temanggung | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kabupaten Temanggung | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | | | | |

RENJA 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|-----|----------------|----------------------|--|--|----------------------|---|-----|----------------|----------------------|--|
| Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Kabupaten Temanggung | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 7 | Kegiatan usaha | 60.744.000 | | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Kabupaten Temanggung | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 7 | Kegiatan usaha | 60.744.000 | |
| Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Kabupaten Temanggung | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 197 | Pelaku Usaha | 222.729.000 | | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Kabupaten Temanggung | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 197 | Pelaku Usaha | 222.729.000 | |
| Pengawasan Penanaman Modal | Kabupaten Temanggung | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 12 | Kegiatan usaha | 121.488.000 | | Pengawasan Penanaman Modal | Kabupaten Temanggung | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 12 | Kegiatan usaha | 121.488.000 | |
| JUMLAH | | | | | 6.600.587.273 | | JUMLAH | | | | | 4.553.709.773 | |

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.6 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Tidak ada usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun dalam proses ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.16

Usulan program dan kegiatan masyarakat

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume/Besaran | Catatan |
|----|----------------------|--------|----------------------|----------------|---------|
| | | | NIHIL | | |

2.7 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.17

Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023

| No. | Nama Inovasi | Input Inovasi | | Proses Inovasi | Output Inovasi | Outcome Inovasi | Pelaksana/ Tahun |
|-----|---|--|----------|--|-----------------------|--|---------------------|
| | | SDM | Anggaran | | | | |
| | CONTOH | | | | | | |
| 1 | DPM Menyapa (Mendampingi Pembuatan NIBnya Pelaku Usaha) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | APBD | Melakukan Pendampingan Pembuatan NIB di Kecamatan-Kecamatan, Pasar, dan Komunitas Pelaku Usaha | NIB bagi Pelaku Usaha | Meningkatnya Kepemilikan NIB bagi Pelaku Usaha di Temanggung | DPMPT SP tahun 2022 |
| 2 | JEMPOL BOSS | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | Melakukan Pendampingan Pembuatan NIB di Kecamatan-Kecamatan, Pasar, dan Komunitas Pelaku Usaha | NIB bagi Pelaku Usaha | Meningkatnya Kepemilikan NIB bagi Pelaku Usaha di Temanggung | DPM PTSP tahun 2023 |

2.8 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak adda Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2023

| No. | Nama Penghargaan | Pemberi Pemnghargaan | Skala | Perangkat Daerah Pengampu |
|-----|---|----------------------|----------|---------------------------|
| 1 | Penyelenggaraan Pelayanan Publik Katergori "SANGAT BAIK" Tahun 2021 | PANRB | Nasional | DPMPTSP |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024-2026 adalah “MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH” dengan sasaran yang akan dicapai adalah “MENINGKATNYA LAJU INVESTASI DAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2025

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN TARGET | TARGET TAHUN 2025 | TARGET KONDISI AKHIR 2026 |
|----------------------------------|--|---|--|---------------|-------------------|---------------------------|
| Meningkatnya Perekonomian Daerah | | | | | | |
| | Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan | | Pertumbuhan realisasi investasi | Angka | 3 | 3,5 |
| | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan | % | 100 | 100 |
| | | | presentase perusahaan yang bermitra | % | 60 | 70 |
| | | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase promosi penanaman modal | % | 50 | 75 |
| | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Pelayanan perizinan secara elektornik | % | 100 | 100 |
| | | | Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu | % | 100 | 100 |
| | | | Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani | % | 100 | 100 |
| | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Pengendalian Penanaman Modal | % | 16 | 20 |
| | | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal | % | 100 | 100 |

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung Tahun 2025

| RANCANGAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025 | | |
|---|--|----------------|
| No. | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Indikatif |
| A. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| a | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.345.666.263 |
| b | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 600.000.000 |
| c | Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 28.500.000 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 30.000.000 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 30.000.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30.000.000 |
| d | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 523.179.000 |
| e | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 60.000.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 5.000.000 |

| RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 | | | (+/-) |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|
| No. | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Indikatif | Pagu Indikatif |
| A. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | |
| a | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.345.666.263 | - |
| b | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 600.000.000 | - |
| c | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000 | - |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 28.500.000 | - |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 30.000.000 | - |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 30.000.000 | - |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30.000.000 | - |
| d | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000 | - |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 190.000.000 | 90.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17.000.000 | - |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 523.179.000 | - |
| e | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 60.000.000 | - |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 5.000.000 | - |

RENJA 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| | | | |
|----------|--|---------------|---|
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.000.000 | |
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | |
| a | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota | | |
| | Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | 20.000.000 | - |
| b | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | |
| | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | 75.000.000 | |
| 3 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | |
| a | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota | | |
| | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 150.000.000 | |
| | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota | 50.000.000 | |
| 4 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | |
| a | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | |
| | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 2.088.281.010 | |
| | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 20.000.000 | |
| 5 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | |
| a | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 60.744.000 | |
| | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | 222.729.000 | |
| | Pengawasan Penanaman Modal | 121.488.000 | |
| | JUMLAH | 6.600.587.273 | |

| | | | | |
|----------|--|---------------|--|-----------------|
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.000.000 | | - |
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | |
| a | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota | | | |
| | Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | - | | (20.000.000) |
| b | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | |
| | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | 7.000.000 | | (68.000.000) |
| 3 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | |
| a | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota | | | |
| | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 7.000.000 | | (143.000.000) |
| | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota | | | (50.000.000) |
| 4 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | |
| a | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | |
| | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 252.403.510 | | (1.835.877.500) |
| | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 7.000.000 | | (13.000.000) |
| 5 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | |
| a | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 60.744.000 | | - |
| | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | 222.729.000 | | - |
| | Pengawasan Penanaman Modal | 121.488.000 | | - |
| | JUMLAH | 4.553.709.773 | | (2.046.877.500) |

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp. 1.986.877.500. Jika dilihat lebih jauh untuk penurunan kegiatan antar lain :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bertambah sebesar Rp. 90.000.000 dikarenakan penambahan operasional listrik;
2. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp. 20.000.000 dikarenakan tidak ada anggaran;
3. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp. 68.000.000 dikarenakan tidak ada anggaran;
4. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota berkurang sebesar Rp. 43.000.000 dikarenakan tidak ada anggaran;
5. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebesar berkurang Rp. 1.842.877.500 dikarenakan anggaran pembangunan MPP sudah terealisasi di tahun anggaran 2024;
6. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berkurang sebesar Rp. 13.000.000 dikarenakan tidak ada anggaran.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung
Tahun 2025

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|------|---|---|-----|-----|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------|-------------|-----------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah | |
| 1 | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | 4.553.709.773 | | | | | | 5.099.080.750 | | | | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | 4.553.709.773 | | | | | | 5.099.080.750 | | | | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | 4.553.709.773 | | | | | | 5.099.080.750 | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase ketersediaan administrasi keuangan | 18 orang/bulan | | | 18 orang/bulan | 3.882.345.263 | | | | | | | 18 orang / bulan | 4.261.579.789 | |
| | 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai | - | | | 14 bulan | 2.345.666.263 | | | - | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik | ASN | - | 2.580.232.889 | | |
| | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|------|------|---|---|---|--|--|------------|----------------|--|--|---|---|---|--------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 18 Orang/bulan | 2.345.666.263 | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik | ASN | | 2.580.232.889 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Cukai Tembakau | - | | | 6 Kegiatan | 600.000.000 | | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik | Pelaku usaha | - | 660.000.000 | |
| | 2 | 18 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 400 Orang | 600.000.000 | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas3. reformasi birokrasi | Pelaku usaha | | 660.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|------|------|--|---|--|--|--|-------------|------------|--|--------------------------------------|---|---|-----|--|------------|--|
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 60 Paket | 30.000.000 | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik | ASN | | 33.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | 150 Laporan | 30.000.000 | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik | ASN | | 33.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|------|------|---|---|---|--|------------|-------------|--|--------------------------------------|---|---|-----|---|-------------|--|
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 60 Laporan | 30.000.000 | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik | ASN | | 33.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | 12 bulan | 733.179.000 | | | - | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik | - | - | 797.496.900 | |
| | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 3.000.000 | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. reformasi birokrasi | | | 3.300.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|------|------|---|--|--|--|--|------------|-------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik | | | | |
| | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 190.000.000 | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik | - | | 200.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | |
| | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 17.000.000 | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana | - | | 18.700.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|------|------|---|--|--|---------|------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik | | | | | | | |
| | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | 14 Unit | 60.000.000 | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik | - | | 66.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | |
| | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | 1 Unit | 5.000.000 | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana | - | | 5.500.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------|---|---|---|--|-----------|------|--|--------------------------------------|---|--|--|------------------------|------|------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan | Masyarkat/pelaku usaha | - | 0,00 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0003 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan | Masyarkat/pelaku usaha | | 0,00 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|--|--|---|--|--|-----------|-----------|--|--------------------------------------|---|--|--------------|---|-----------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Tersedianya Peta Potensi Investasi | - | | | 1 Dokumen | 7.000.000 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan | Pelaku usaha | - | 7.700.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 000 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 7.000.000 | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan | Pelaku usaha | | 7.700.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-----|---|--|------|--|--|------------|-----------|--|--|---|--|---|--------------|-----------|-----------|--|
| 3 | 2 | 1 | 0 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | persentase promosi penanaman modal | 50 % | | | 50 % | 7.000.000 | | | | | 50 % | 7.700.000 | | | |
| | 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Promosi yang diikuti | - | | | 1 Kegiatan | 7.000.000 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan | Pelaku usaha | - | 7.700.000 | | |
| | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 000 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 7.000.000 | | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan | Pelaku usaha | | 7.700.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|------|------|---|--|-------|-----------|------|--|--------------------------------------|---|--|--------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | n UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan | | |
| | 2 | 18 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan | Pelaku usaha | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 4 | 2 | 18 | 04 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik | 100 % | | | | | | | | | 100 % | 376.643.861 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------|---|--|---|--|--|-------------------|-------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------|---|----------------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | - | | | 4000 orang | 252.403.510 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan | Pelaku usaha | - | 376.643.861,00 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 4000 Pelaku Usaha | 245.403.510 | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan | Pelaku usaha | | 368.943.861 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|------|--|--|--|------|--|------------------|-------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------|------|-------------|--|
| | | | | | | | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | 100 Pelaku Usaha | 7.000.000 | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan | Pelaku usaha | | 7.700.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5 | 2 | 18 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | persentase pengendalian penanaman modal | 16 % | | 16 % | 404.961.000 | | | | | | 16 % | 445.457.100 | |
| | 2 | 18 | 05 | 2.01 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | - | | 12 bulan | 404.961.000 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan | Pelaku usaha | - | 445.457.100 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|--|--|---|--|--------------|-------------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 000 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 5 | 1 | 4 | | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | 0 Kegiatan Usaha. | 60.744.000 | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan | Pelaku usaha | 66.818.400 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 000 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 5 | 1 | 5 | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | 197 Pelaku Usaha | 222.729.000 | Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan | Pelaku usaha | 245.001.900 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 000 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 5 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |

RENJA 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|-------------------|----------------------|---|--|---|--|--------------|--|-------------|--|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | | | | | | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | | | | 12 Kegiatan Usaha | 121.488.000 | Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan | Pelaku usaha | | 133.636.800 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | | | | | | 4.553.709.773 | | | | | | | | | | | | 5.099.080.750 | |

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 96,28 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 4.436.410.947, realisasi belanja besar Rp. 4.275.746.684,00, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 56,58 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0 %, belanja Sebesar Rp. 4.204.613.828,00

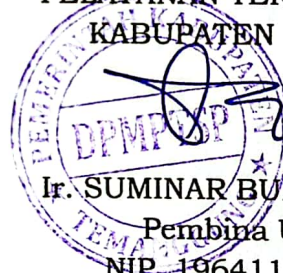
Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 4.204.613.828,00,- yang terdiri dari 5 program

antara lain program pengembangan iklim penanaman modal; program promosi penanaman moda; program pengendalian pelaksanaan penanaman modal; program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dst.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 27 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 196411141990031005